

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBANTU
PENYELESAIAN KASUS ROHINGYA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-2
pada Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:
Bara Cita Mahendra
20151060005

**Magister Ilmu Hubungan Internasional
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2018**

PERAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN KASUS ROHINGYA

Bara Cita Mahendra
Magister Ilmu Hubungan Internasional
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Mahendra.bara@gmail.com

ABSTRACT

The form of propagation is important, the service is to take them to the right and maximum path. In this case, Muhammadiyah has a purpose, “enforcing and upholding the religion of Islam so that it can manifest the true Islamic society” improvements in methods and strategies are attitudes in the face of problems, challenges and the development of the time supported assets owned. Geopolitic changes and global economic forces and their negative impacts have to be strong and courageous in entering the framework of thinking and strategic issues. The orientation of dakwah movement changed, from religious mission to humanity. Likewise the understanding of philanthropy in a religious perspective. The position of the government of a country that can no longer handle alone, generates commitment and cooperation. Two points addressing disaster and the environment are the starting points for carrying out strategic managements steps towards the root of the problem. One of them is the Muslim problem in Rakhine.

Keywords: Muhammadiyah, Humanity, Rakhine

PENDAHULUAN

Bentuk pemikiran menjadi hal krusial, bahwa pelayanan terhadap masyarakat adalah mengajak mereka ke jalan yang benar dan maksimal. Dalam hal ini, saat berdiri Muhammadiyah memiliki tujuan: “Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputra di dalam Residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya”.¹ Sebagai penyesuaian perubahan geopolitik dan kekuatan ekonomi global beserta dampak negatif yang ditimbulkannya

Berdasarkan hal tersebut, ini menjadi sebuah pedoman klasik yang perlu tetap ada. Dalam tinjauan bahasa, dakwah yang berasal dari kata “*da’a*” (دَعَا) (berarti “teriakan”, “panggilan” atau “undang-an”. Sedang berdasar bentuk kata kerja “*naa da*” (نَادَى) berarti “berteriak”, “memanggil/ mengundang”.² Pesan, materi, dan apa yang dibawa dalam kegiatan dakwah atau apapun adalah baik. Disinilah pentingnya pengembangan cara, metode, atau strategi dakwah Muhammadiyah sebagai “*global civil society*” dalam arus “*global (good) governance*”. *Bil-lisan* (perkataan, tulisan, media) maupun *bil-hal* (perbuatan, amaliah) memerlukan pengembangan dalam pembaruan (*tajdid*) dan kesungguhan (*ijtihad*).

Muhammadiyah memiliki cara khusus dengan dukungan aset yang dimiliki. Dimana terbagi dalam 14 jenis amal usaha dengan klasifikasi bidang garap, antara lain: bidang agama Islam, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bidang politik kenegaraan, bidang ekonomi dan keuangan.³ Kesemuanya merupakan layanan, dan dalam perkembangan jaman difokuskan pada MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Centre*), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).⁴

Berbeda dengan cara membangun Barat yang cenderung individualis, Muslim cenderung menggali nilai-nilai filantropis, voluntarisme dan kasih sayang terhadap sesama ummat.⁵ Konsep filantropi (*Philanthropi: Philos* berarti “cinta”, dan *anthropos*

¹ Nashir, Haedar, “*Muhammadiyah dan Pembentukan Masyarakat Islam*”, mengutip data Mh. Djaldan (1998), 30 Juni 2008 dan Sari, Zamah, “*Masyarakat Utama dalam Sejarah Gerakan Muhammadiyah*”, merupakan kumpulan tulisan dalam buku “Menuju Peradaban Utama, Membedah Peran Muhammadiyah di Ruang Publik”, Al Wasat, Cetakan I, Desember 2011, hal 74-77

² Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Diterbitkan Multi Karya Grafika, Pongpes Krapyak, Yogyakarta, hal 895

³ “Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, Disampaikan pada Mukhtamar ke-47 di Makassar tgl 3-7 Agustus 2015, hal. 23

⁴ Hajriyanto Y. Thohari, “*Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah*”, Makalah kajian Ramadhan PWM Jawa Timur, 3-4 Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Malang

⁵ Hilman Latief, “*Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 109

berarti “manusia”) adalah pendampingan yang bersifat pemberdayaan jangka panjang.⁶ Untuk menjawab permasalahan publik yang dialami masyarakat.

Pemahaman filantropi dalam perspektif keagamaan tidak hanya bersinggungan dengan material namun juga memberikan waktu, ruang dan pengetahuan.⁷ Menurut Forum Global OECD tentang lingkungan, “*air, makanan dan energi merupakan hal penting yang berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia*”.⁸ Dalam hal ini, pemerintah suatu negara sebagai aktor penting dunia tidak bisa lagi sendirian menangani persoalan besar tersebut. Diperlukan komitmen dan kerja sama dengan berbagai aktor agar menjadi suatu keniscayaan, salah satunya adalah Muhammadiyah. Organisasi yang menyikapi secara bijak, salah satunya melalui tahapan dibawah naungan konstitusi.

Ini menjadi titik tolak menjalankan langkah-langkah pengelolaan strategis terhadap akar masalah (*creative philanthropy*).⁹ Sebuah sikap menghadapi dengan pemikiran yang dicantumkan dalam buku “Fikih Kebencanaan”. Merupakan hasil Musyawarah Nasional Tarjih XXIX di Yogyakarta, 19-22 Mei 2015 diselenggarakan.¹⁰

ANALISA

Masa sekarang, organisasi berbasis keimanan (organisasi keagamaan) menjadi pemeran utama. Dakwah kontemporer telah dikembangkan. Bekerjasama dengan struktur dan non-struktur pemerintah di dalam maupun luar negeri. Muhammadiyah melakukan hal ini dalam naungan konstitusi. Masalah kemanusiaan menjadi spesifikasinya.

Misi dakwah dengan metode berbeda dalam kondisi masyarakat yang sedang menderita karena problem kemanusiaan, dilakukan bekerjasama dengan struktur negara dalam dan luar negeri. Komunikasi bersama dan melalui mereka menjadi sistematis ragam bantuan.

Disinilah terjalin kerjasama lembaga negara dan non-negara, lintas agama dan geografis yang menjadi makna partisipasi masyarakat terhadap sesama. Sebagai organisasi keagamaan, bisa mengatur masalah doktrin, memimpin dan mewakili ummat

⁶ Ibid, hal 10

⁷ Ibid, hal 24

⁸ Riccardini Fabiola, De Rosa Dalila, “*How the Nexus of Water/Food/Energy can be seen with the Perspective of People Well being and the Italian BES Framework*”, www.sciencedirect.com, 2016

⁹ Hilman Latief, op.cit, hal 26

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”, hal 9-11

melalui keterlibatan dengan negara dan aktor-aktor lain. Memobilisasi ummat beriman dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana.

Untuk memahami keterlibatan Muhammadiyah dalam diplomasi untuk tujuan kemanusiaan, makalah ini akan menyoroti tentang aktifitas organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan. Penempatan gagasan keimanan sebagai basis aktifitas kemanusiaan dilakukan Muhammadiyah dengan sosialisasi dalam berbagai forum (nasional, regional maupun internasional). Dikembangkan dengan langkah diplomasi.

PERSPEKTIF TERHADAP DAKWAH

Faith-Based Organizations (FBO) secara fokus diarahkan. Tiga belas Rekomendasi sebagai keputusan Muktamar ke-47 di Makassar menyikapi isu-isu strategis keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal:

1. Membangun masyarakat Ilmu.
2. Toleransi dan kerukunan antar ummat beragama.
3. Peningkatan daya saing ummat Islam.
4. Penyatuan kalender Islam.
5. Melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.
6. Pengendalian narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
7. Tanggap dan tangguh menghadapi bencana.
8. Memaksimalkan bonus demografi.
9. Gerakan berjamaah lawan korupsi.
10. Jihad Konstitusi.
11. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
12. Pemanfaatan teknologi komunikasi.
13. *Human trafficking* dan perlindungan buruh migran.

Sebelumnya dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan dalam kancah internasional, Muhammadiyah terlibat dalam tim bantuan diantaranya untuk peristiwa badai/ angin topan *Haiyan* yang terjadi di Philipina, tanggal 7-8 November 2013 dan gempa bumi 25 April 2015 di negara Nepal.

Dalam tiga belas rekomendasi ini, ada dua poin yang dikategorikan dalam membahas masalah kebencanaan dan persoalan lingkungan (poin ketujuh dan sebelas). Ini digunakan dalam menjalankan misi dakwah kemanusiaan di kancah nasional maupun internasional. Berbagai macam cara dilakukan sesuai dengan perangkat yang

dimilikinya. Keterlibatan tokohnya secara langsung maupun lembaga/ ortom di jajarannya, juga amal usaha dibawahnya dengan menjalankan program lintas negara dan agama sesuai spesialisasi masing-masing. Dakwah dalam kondisi masyarakat yang sedang menderita karena problem kemanusiaan, berdasarkan pemikiran yang telah menjadi pustaka.

Dakwah yang dilakukan seiring perkembangan jaman menjadi manifestasi gerakan bertransformasi. Merujuk pada tulisan, “*Cerita tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja*”. Dalam tulisan ini, dakwah awal Muhammadiyah melalui pembagian (spesifikasi), diantaranya bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem yang diketuai oleh H.M. Syoedja’. Saat berlangsung Rapat Anggota Muhammadiyah Istimewa (17 malam 18 Juni 1920) dihadiri oleh lebih kurang 200 anggota dan simpatisan yang diundang. H.M. Syoedja’ menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pertolongan kepada masyarakat yang menderita sakit, adalah dengan membangun *hospital*. Berikutnya *Armhuis*, (rumah miskin), setelah itu membangun *Weeshuis* (rumah yatim).¹¹

Tulisan, “*Pergeseran Paradigma Dakwah*” menyebutkan, langkah yang dijalani Muhammadiyah bisa dianggap “tepat” dalam menyikapi abad kedua yang mulai dimasuki. Diingatkan tentang “prediksi” Rasulullah SAW, bahwa dalam seratus tahun akan muncul mujadid baru yang gigih memperbaiki agamanya (*man yujaddidu laha dinaha*). Inilah dimana etos keilmuan Islam menjadi penyeimbang Islamisasi ilmu pengetahuan.¹² Inilah kenyataan yang terjadi, bahwa aktifitas dakwah modern organisasi ini selain Al Quran dan As-Sunnah memiliki panduan berupa buku “Fikih Kebencanaan”.

Dalam pemikiran Gerard Clarke dari Pusat Studi Pembangunan, *University of Wales*, menjelaskan tentang tipologi organisasi berbasis agama (*Faith Based Organization*) dalam konteks pembangunan internasional. Merupakan bagian penting dalam menetapkan dasar perbandingan organisasi lintas agama dan geografis: mengatur masalah doktrin, memimpin umat beriman dan mewakili mereka melalui keterlibatan dengan negara dan aktor-aktor lain; memobilisasi umat beriman untuk membantu masyarakat miskin dan lainnya, serta mendanai atau mengelola program yang menangani kemiskinan dan pengasingan sosial; menafsirkan dan menyebarkan

¹¹ “*Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja*”, hal 100-101

¹² Zakiyuddin Baidhawiy, “SATU ABAD MUHAMMADIYAH, *Pergeseran Paradigma Dakwah*”, e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id, 15 September 2016

kepercayaan sebagai sebuah konstruksi politik, mengorganisir dan memobilisasi kelompok-kelompok sosial berbasis identitas keimanan tetapi dalam mengejar tujuan politik yang lebih luas atau, mempromosikan kepercayaan sebagai konstruksi sosial budaya, sebagai sarana menyatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda atas dasar identitas budaya yang berbasis agama; menyebarkan pesan berupa kunci keimanan (diluar penganut agamanya), secara aktif mempromosikan masalah keimanan dan mencari orang-orang yang bertaubat untuk itu, atau dengan mendukung dan terlibat bersama komunitas agama lain berdasar prinsip kunci keimanan; pada organisasi radikal, ilegal, atau teroris “berbasis” agama mempromosikan bentuk identitas keimanan yang radikal atau militan, terlibat dalam praktek-praktek ilegal atas dasar kepercayaan atau terlibat dalam perjuangan bersenjata atau tindakan kekerasan yang dibenarkan atas dasar keimanan.¹³

Hossam Said, *Deputy General Manager and Head of Projects Field Offices, Islamic Relief, UK*. menyebutkan bahwa berdasarkan sejarah masa awal Islam, pemerintah Islam yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme “*Bait-ul-Maal*” (*the House of Treasury*) yang merupakan dana kolektif untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Islam juga membuka pintu untuk sedekah lain yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Inilah penjelasan luas mengenai sasaran wakaf, sekolah dan rumah sakit Islam. Selainyang dikategorikan dalam Al Quran surat At Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ° فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ° وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

¹³ Jonathan Benthall, “Introduction: Faith-based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, *Proceedings of the Workshop Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors, Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–19 2005*, hal 5

Keadaan darurat secara alamiah maupun non-alamiah juga menjadi menjadi tujuannya. Keyakinan Islam menjadi peran penting menjadikan manusia sadar akan skala kebutuhannya. Disinilah muncul kategori baru seiring perkembangan jaman: Penerima bantuan/ amal adalah Muslim dan non Muslim (*the Recipients of Charity, Muslim and non-Muslim recipients*); Bekerja untuk semua manusia (*Working for Everyone, Muslims and non-Muslims matter*); Bekerja di wilayah non-Muslim (*Working in Non-Muslim Areas*); Pekerjaan dan bantuan Missionaris/ merujuk bahasa Arab, *da'wah*¹⁴(*Missionary Work and Aid*); Bekerja dalam kondisi politik yang tegang (*Working in a Tense Political Climate*).¹⁵

Penjelasan Fikih Kebencanaan yang merupakan hasil keputusan Musyawarah Tarjih Muhammadiyah XXIX di Yogyakarta, mengenai Al-Quran dan Hadits yang menyebutkan istilah tentang bencana memiliki variasi dengan penekanan dan konteks berbeda. antara lain:¹⁶

1. *Musibah*. Berasal dari kata *a-sa-ba* yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia baik dalam peristiwa alam maupun sosial.
2. *Bala'*. Dijelaskan bahwa kata *bala'* sesungguhnya lebih bermakna sebagai “cobaan untuk memperteguh keimanan”, yang bisa berupa peristiwa menyedihkan atau menyenangkan.
3. *Fitnah* (*fa-ta-na*), yang arti asalnya *الْأَعْيَابُ* (cobaan), *الْأَعْمَتَانُ* (ujian) dan *الْأَعْتَابُ* (ujian). Didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antar manusia, yang mana memunculkan dampak negatif berupa kematian, ketakutan, kesesatan dan kericuhan.
4. *'Azab*. Berasal dari kata *'a-za-ba* yang artinya sangat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, *'azab* bermakna sesuatu yang membuat tersiksa. Namun bila dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia berarti siksaan.

¹⁴ Jonathan Benthall, “Introduction: Faith-based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, *Proceedings of the Workshop Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors, Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–19 2005*, hal 4

¹⁵ “Faith-based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors: An Islamic Perspective”, *Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors, Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–19 2005*, hal 42-44

¹⁶ “Fikih Kebencanaan”, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hal 12-36

5. *Fasad*. Berasal dari kata *fa-sa-da*. Dalam lisan arab diartikan sebagai lawan dari kata *shalah*. *Shalah* berarti bagus, baik dan damai, dengan demikian arti *fasad* berarti tidak bagus, tidak baik dan tidak damai.
6. *Halak*. Secara bahasa berarti mati, binasa dan musnah. Dalam hal ini dihubungkan dengan tindakan Allah memusnahkan, mematikan atau membinasakan baik individu maupun kelompok.
7. *Tadmir*. Berasal dari kata *dam-ma-ra* yang berarti menghancurkan, sehingga kata *tadmir* berarti kehancuran. Istilah ini merupakan sifat dari sebuah kejadian yang buruk bagi manusia, yakni sifat “hancur sehancur-hancurnya”.
8. *Tamziq*. Ini merupakan bentuk kata benda *maz-za-qa* yang berarti kehancuran. Definisi istilah ini sama dengan istilah *Tadmir*.
9. *Iqab*. Berasal dari kata *a-qa-ba* yang berarti membalas, menghukum. Istilah ini merujuk pada peristiwa yang akan didatangkan oleh Allah bila manusia mendustakan Allah dan Rasul.
10. *Nazilah*. Berasal dari kata *na-za-la*. Apabila tidak memerlukan obyek berarti “turun”, sedangkan bila menggunakan obyek berarti “menurunkan”.

Buku ini merupakan panduan dua lembaga (MDMC dan Lazismu) milik Muhammadiyah dalam rangka ikut membantu mengatasi masalah “sosial” masyarakat. Didalamnya memang menjelaskan tentang kepemilikan potensi dan resiko negara kita berdasar letak geografis yang strategis. Resiko sebagai “Pusat peradaban” dan “potensi alamiah” dijelaskan amat membahayakan dan menghancurkan.

Munculnya hal tersebut ditambah kompleksitas kondisi masyarakat, segi demografis (kepadatan penduduk) dan segi ekonomis (kemiskinan yang masih tinggi).¹⁷ Apa yang dijelaskan, juga bisa dipergunakan untuk melakukan pertolongan masalah sosial melewati batas negara seperti badai Haiyan di Philipina, gempa di Nepal dan kasus suku Rohingya di negara Myanmar. Ini menambah solusi baru dalam salah satu kasus dunia, dalam hal ini “bencana”. Menjadi pemberi informasi baru selain buku sebelumnya yaitu *Disaster Diplomacy*.

PROBLEM KEMANUSIAAN ROHINGYA

Burma (nama sebelum Myanmar) dikategorikan sebagai multi-nasional, multi-budaya dan multi-agama. Dikarenakan secara kolektif dimiliki oleh berbagai ras, bangsa

¹⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”, hal 1

dan etnis. Sekitar 60% dari populasi negara adalah non-Burma, yang kebanyakan berada di negara bagian/ provinsi. Antara lain Shan, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Pa-o, Palaung, Padaung, Naga, Lahu, Akha, Wa, Rohingya (Muslim Arakan), Rakhine (Budha Arakan) dan banyak ras pribumi lainnya.

Arakan merupakan provinsi barat laut Burma dengan hamparan pegunungan sempit dengan dibatasi pantai 360 mil Teluk Benggala di barat, Chin Hills di timur laut. Berbatasan 176 mil dengan Bangladesh, 48 mil yang ditutupi oleh sungai Naf dan merupakan unit fisiografi alami pegunungan Arakan Yoma arah utara ke selatan. Ibukota Arakan, Akyab terletak di pantai laut di muara Sungai Kaladan dan merupakan ibu kota Arakan sejak tahun 1826 setelah perjanjian Yandabo.

Ada dua etnis utama di Arakan, Rohingya (muslim) dan Rakhines/ Maghs (Budha). Untuk Rohingya mayoritas tinggal di dataran Riparian (Naf, Mayu, dan Kaladan). Dari empat belas provinsi di negara ini, Arakan merupakan satu-satunya wilayah mayoritas Muslim (Separuh penduduk muslim Burma tinggal di sini). Menjadikannya dipimpin secara bergantian.

Keadaan berubah, saat posisi mereka dalam “naungan” perubahan kebijakan pemerintahan Burma dan Inggris. Diskriminasi dengan tidak ada satupun Muslim yang dapat memegang satu posisi tinggi dalam pemerintahan terjadi.¹⁸ Identitas sebagai "Kalas" (orang asing) dialamatkan pada mereka. Bahkan kemudian diadopsi oleh junta militer Burma yang berkuasa. Rohingya yang telah menjadi bagian masyarakat Arakan bersama etnik pribumi dari jaman dahulu “dikaburkan”.¹⁹ Ditambah komunitas Rakhine Maghs yang “mencap” Rohingya sebagai imigran gelap dari negara tetangga.²⁰

LANGKAH PEMERINTAH MYANMAR

Untuk menyikapi kejadian di Rakhine. Awalnya, bulan September 2016, setelah permintaan dari *State Counsellor* Daw Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar, Yayasan Kofi Annan (*Kofi Annan Foundation*) dan Kantor Penasehat Negara (*The*

¹⁸ M. A. Tahir Ba Tha, “*History of Rohingyas and Kamans*”, Bab I, *Introduction*

¹⁹ Kata Pengantar A. F. K. Jilani dalam tulisan M. A. Tahir Ba Tha, “*History of Rohingyas and Kamans*”, 20/2/1998

²⁰ Tuduhan inilah yang menjadi alasan utama M. A. Tahir Ba Tha (penduduk asli desa Rohingyadaung, Kotapraja Buthidaung. Saat buku ini diterjemahkan, dirinya tinggal di Ran-goon bersama keluarga untuk melewati masa pensiunnya.) menulis artikel tentang Rohingya di *Daily Mirror*, *Kaba-Alin* dan *Majalah Guardian of Rangoon* di tahun 1960-an. Saat dipindahkan ke kota Myitkyina dari Negara Bagian Kachin sebagai Manajer Bank, Tahir Ba Tha diminta menulis buku tentang Sejarah Rohingya oleh anggota Komite Eksekutif Liga Nasional Rohingya AS (U.R.N.L), Myitkyina. Atas permintaan mereka, buku “*History of Rohingyas and Kamans*” ditulis dalam bahasa Burma dan diterbitkan oleh Liga Nasional Rohitya Bersatu (*United Rohingya National League*) dari Myitkyina, Burma. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh AFK Jilani dalam bahasa Inggris. Ini disebut sebagai buku pertama yang dicetak dan diterbitkan dalam bahasa Burma pada tahun 1963. Didalamnya diberikan informasi, bahwa Rohingya adalah keturunan Arab yang hadir tahun 1200-an. Selain Rohingya, ada Kaman yang juga kelompok Arakan beragama Islam.

Office of the State Counsellor) membentuk Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine. Komisi ini merupakan entitas nasional dan mayoritas anggotanya berasal dari Myanmar, terdiri dari enam anggota nasional (U Win Mra, U Aye Lwin, Dr. Tha Hla Shwe, Dr. Mya Thida, Daw Saw Khin Tint dan U Khin Maung Lay) dan tiga anggota internasional (Ghassan Salamé, Laetitia van den Assum dan Kofi Annan sebagai ketua).

Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang masalah kompleks yang dihadapi dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan di wilayah Rakhine. Selama setahun telah dilaksanakan komunikasi dengan para pemimpin dan komunitas politik (formal maupun non formal) di seluruh Negara Bagian Rakhine. Ini merupakan dasar untuk melakukan analisis, gagasan, kekhawatiran, dan rekomendasi laporan akhir Komisi. Dalam hal ini Yayasan Kofi Annan diposisikan sebagai pemberi gagasan tentang praktik dan norma serta membantu beberapa aspek pelaksanaan.

Ada dua kali laporan yang dihasilkan oleh komisi yang didirikan pada 5 September 2016:

1. *Interim Report and Recommendations.*

Dilaporkan pada 16 Maret 2017. Laporan ini bertujuan, bahwa sambil menunggu publikasi laporan akhir, maka diperlukan penyajian saran/ rekomendasi sementara. Mengingat perkembangan terakhir yang terjadi memerlukan tindakan segera dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berlanjut dan juga peletakan dasar bagi masa depan agar lebih damai dan sejahtera. Komisi ini tidak diamanatkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sebaliknya ini ditujukan untuk mengatasi masalah kelembagaan dan struktural yang merongrong prospek perdamaian, keadilan dan pembangunan di Rakhine. Serta mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat di negara bagian.²¹

Komisi telah dilakukan 115 pertemuan konsultasi di Sittwe, Mrauk U, Myebon, Kyawkpyuh, Ramree, Maungdaw, Buthidaung, Yangon dan Naypyidaw, juga di Dhaka dan Cox's Bazar di Bangladesh. Sekitar 760 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang ditemui.²² Diuraikan, bahwa Rakhine merupakan gabungan permasalahan kompleks antara kemiskinan, kurangnya pembangunan, ketegangan antar kelompok, dan keluhan dari pusat-pinggiran. Masyarakat lokal di Rakhine memiliki ketakutan yang mengakar kuat terhadap niat dari kelompok lain, serta kepercayaan

²¹ Advisory Commission on Rakhine State, "*Interim Report and Recommendations*", Maret 2017, hal 4

²² *Ibid*, Maret 2017, hal 5

terbatas pada institusi pemerintah. Secara khusus, kemampuan pemerintah dalam “pelayanan” (termasuk perlindungan) untuk semua masyarakat telah lama tidak optimal. Komisi menganggap, ini merupakan permasalahan kompleks di Rakhine, dan dirasa kurangnya "solusi penyelesaian cepat" dari pemerintah.

2. *Towards A Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine.*

Ini merupakan Laporan Akhir Komisi Penasihat tentang Negara Bagian Rakhine, tepatnya pada bulan Agustus 2017. Didalamnya dicantumkan visi yang lebih luas dari sebuah identitas nasional, dikarenakan menemukan kekuatan dalam keragaman yang harus diproyeksikan. Pembangunan di Rakhine bukanlah *zero-sum-game*, dan negara hanya akan berhasil apabila melalui *inklusifitas* dan integrasi. Pertanyaan yang didapatkan adalah, “bagaimana mereka akan hidup bersama?” Reintegrasi, bukan segregasi, adalah jalan terbaik menuju stabilitas dan pembangunan jangka panjang di Negara Bagian Rakhine.²³

Adanya sejarah panjang dan membanggakan yang dimiliki penghuni wilayah ini, menjadikan “lahirnya” mimpi masa depan. Kenikmatan tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah, dan berlokasi strategis untuk perdagangan regional ternyata belum dimanfaatkan optimal. Berbagai masalah yang merusak dari keterbelakangan, konflik antar kelompok, dan ketidakpuasan berlama-lama terhadap pemerintah pusat terjadi. Tidak ada solusi “cepat” untuk tantangan-tantangan ini., namun menemukan jalan untuk bergerak maju adalah tugas yang sangat mendesak. Sehingga status quo tidak bisa dipertahankan. Komisi ini membagi tiga krisis yang menimpa Negara Bagian Rakhine.²⁴

Pertama. Krisis pembangunan. Berdasar rata-rata nasional, kemiskinan kronis membuat masyarakat menderita dan tertinggal. Konflik yang berkepanjangan, ketidakpastian penguasaan lahan dan kurangnya peluang mata pencaharian telah menghasilkan migrasi yang signifikan dari negara, mengurangi ukuran angkatan kerja dan merusak prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Adanya pembatasan aktifitas pada penduduk Muslim secara ekonomi melukai. Terjadi kegagalan untuk meningkatkan hubungan antar-kelompok, pemisahan yang dipaksakan dan ancaman kekerasan dan ketidakstabilan yang terus meningkat. Berakibat menghalangi investasi sektor swasta. Kekayaan sumber daya alam dan pengembangan industri ekstraktif

²³ Advisory Commission on Rakhine State, “*Towards A Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine*”, hal 10-11

²⁴ Ibid, hal 9-10

(investasi terkait minyak dan gas di Kyawkpyuh) belum memberi efek positif yang signifikan bagi masyarakat setempat. Komunitas Rakhine dan Muslim merasa terpinggirkan dan tidak berdaya dengan keputusan yang diambil di Naypyitaw.

Kedua. Krisis hak asasi manusia. Penderitaan akibat kekerasan dan pelecehan, kewarganegaraan yang tidak jelas dan diskriminasi yang mendalam telah membuat komunitas Muslim sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam prosentase, sekitar sepuluh persen dari orang-orang tanpa negara di dunia diyakini tinggal di Myanmar. Dalam negara ini, komunitas Muslim di Rakhine merupakan satu komunitas tanpa negara terbesar di dunia. Permasalahannya antara lain adanya pembatasan yang mempengaruhi hak-hak dasar dan aspek kehidupan sehari-hari. Sekitar 120.000 jiwa masih tersisa di kamp-kamp untuk Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons/ IDPs*). Mereka tidak diperbolehkan memiliki perwakilan politik, apabila mempunyai, maka biasanya dikeluarkan dari politik tubuh Myanmar. Ini dianggap sebuah kegagalan pemerintah dalam mendapatkan kepercayaan dari komunitas Muslim atau Rakhine.

Ketiga. Krisis keamanan. Kekerasan tahun 2012 masih segar dalam ingatan komunitas Islam, sehingga masih memendam ketakutan yang mendalam. Menjadi minoritas di masa depan, merupakan kekhawatiran. Segregasi telah memperburuk prospek untuk saling pengertian. Pemerintah harus lebih meningkatkan upayanya untuk memastikan bahwa semua masyarakat merasa aman dan dalam melakukannya melalui pemulihan perpaduan kokoh dalam masyarakat. Waktu tidak akan menyembuhkan Rakhine, kecuali jika permasalahan ditangani dengan segera. Radikalisasi menjadi risiko nyata, apabila gagal menangani kedua masalah ini. Konflik yang terjadi pada 9 Oktober 2016 menyebabkan puluhan ribu Muslim melintas di seberang perbatasan ke negara Bangladesh. Hak untuk membela wilayahnya sendiri dan respon militeristik tidak bisa untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut. Yang dibutuhkan adalah respons politik, pembangunan, keamanan dan hak asasi manusia untuk memastikan bahwa kekerasan tidak meningkat dan ketegangan antar kelompok tetap terkendali.

Jika keluhan dari penduduk lokal diabaikan, mereka akan menjadi lebih rentan pada pengaruh untuk melakukan perlawanan. Mengatasi krisis pembangunan dan hak asasi manusia akan membantu mengatasi krisis keamanan. Dua tema konflik yang berulang mendominasi narasi ini: Pertama, hubungan konkrit antara masyarakat

Rakhine dan pemerintah pusat; dan kedua, ketegangan dan kadang-kadang kekerasan antara Rakhine dan komunitas Muslim.²⁵

REKOMENDASI KOFI ANNAN FOUNDATION

Pemikiran mengenai hal yang perlu dilakukan, menjadi bahan pertimbangan atau menjadi pilihan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang dilakukan *Kofi Annan Foundation* setelah menjalankan advokasi. Lembaga ini menyampaikan saran berdasar data yang mereka temukan. Sebagai bahan pertimbangan untuk implementasi lembaga yang ingin terlibat secara langsung dalam pertolongan pasca bencana. Berikut adalah rekomendasi lembaga ini:

1. Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Rakhine.
2. Kewarganegaraan.
3. Kebebasan untuk Beraktifitas
4. Diadakannya Kamp Pengungsi
5. Akses Kemanusiaan.
6. Akses Media.
7. Pendidikan.
8. Kesehatan.
9. Narkoba.
10. Perwakilan dan Partisipasi Komunitas.
11. Keterpaduan antar Komunitas.
12. Sektor Keamanan.
13. Akses Hukum.
14. Pembangunan Budaya.
15. Isu Perbatasan dan Hubungan Bilateral dengan Bangladesh.
16. Hubungan Regional.

BANTUAN MUHAMMADIYAH BERSAMA PEMERINTAH DAN ORMAS LAIN

Permasalahan yang menimpa Rohingya disikapi oleh internasional, salah satunya Muhammadiyah. Bersama Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta lembaga lainnya dilakukan dengan keyakinan tentang posisi penting yang didukung persepsi luas, bahwa mereka memiliki pemikiran 'ikatan bersama tentang

²⁵ Ibid, hal 18

kemanusiaan.²⁶ Ini bisa menjadi “kacamata” kita memandang apa yang dilakukan Muhammadiyah saat aktif terlibat. Melalui *Muhammadiyah Aid*, persepsi tentang “kemanusiaan” merupakan problem yang perlu diselesaikan bersama adalah pegangannya. Bersama pemerintah dan LSM lain di Indonesia menjadi langkah konkritnya.

Wilayah berbeda yang ditempati Rohingya, dimana mereka bagian dari Myanmar tentu suatu permasalahan yang “menghinggapi” Muhammadiyah sebagai LSM. Sama seperti yang diungkapkan Snow dalam tulisan Tarrow, apabila para aktifis ingin menusuk “kerak bumi”, mereka harus menghubungkan program mereka dengan “akal sehat”.²⁷

Berdasarkan pengalaman, langkah pertama untuk melibatkan diri, tepatnya di Rakhine adalah “bergandeng tangan” dengan birokrasi yang seimbang (pemerintah negara dengan pemerintah negara). Disinilah menempatkan posisi pemerintah Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia) untuk menjalankan diplomasi terhadap pemerintah Myanmar. Tentu disini sebelum menjalankan diplomasi, yang dimulai Kemenlu RI adalah kesepakatan sebagai agenda bersama Muhammadiyah dan LSM lain.

Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) menjadi nama programnya. Program ini bertujuan memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine. Ini sejalan dengan *Advisory Commission on Rakhine State* yang dikeluarkan oleh *Kofi Annan Foundation*.²⁸

Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) merupakan gabungan sebelas lembaga kemanusiaan di Indonesia terdiri dari *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, PKPU *Human Initiative*, Dompot Dhu’afa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat *Daarut Tauhid*, LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *Social Trust Fund* UIN Syarif Hidayatullah.

Berkolaborasi dengan Kemenlu RI dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi sarana pemahaman bersama berbagai pihak dalam membantu penanganan masalah konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar. AKIM dan masyarakat Indonesia bersama-

²⁶ “*NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa*”, Edited by David Potter, Frank Cass London, hal 66

²⁷ Tarrow, Sidney, “*The New Transnational Activism*”, www.cambridge.org, Cambridge University Press, 2005, hal 61

²⁸ “*Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan*”, www.kemlu.go.id, 31 Desember 2017

sama mendorong “kemanusiaan tanpa batas, membantu dengan menebar cinta bukan dengan menebar kebencian”.

Komunikasi dengan pemerintah Myanmar dilakukan secara intensif. Beberapa komunikasi penting ini, antara lain: Menlu RI Retno Marsudi menemui mengadakan pertemuan dengan *State Counsellor* Myanmar Daw Aung San Suu Kyi di Myanmar tanggal 6 Desember 2016. Pertemuan Presiden RI, Joko Widodo dengan Kofi Annan 9 Desember 2016 di Bali. Pada tanggal 19 Desember 2016 diadakan pertemuan *Retreat* Menlu ASEAN di Yangon dan pertemuan kembali Menlu RI dengan *State Counsellor* Myanmar.²⁹

SIKAP MUHAMMADIYAH

Secara organisasi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap yang mendesak PBB, ASEAN, dan pemerintah Indonesia mengambil sikap atas krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Tertuang dalam surat no: 396/PER/I.0/H/2017 tentang “Genosida Etnis Rohingya Terkini di Myanmar”.

Melalui MDMC, yang merupakan pengembangan dari unit kegiatan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) periode 2005-2010. (2010-2015 dirubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) dengan kedudukan setingkat Majelis.³⁰ Ini didasarkan atas nilai-nilai atau keyakinan: (i) nilai dasar ajaran agama Islam “*rahmatan lil alamin*”, (ii) sejarah perjuangan Muhammadiyah sebelumnya, (iii) Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai *leading sector* kekuatan Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana, (iv) tuntutan perkembangan kerja kemanusiaan global.

Berikutnya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU). Lembaga yang latar belakang pendiriannya ada dua faktor: Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah; Kedua, zakat, diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan.³¹

²⁹ “Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Rohingya/ Rakhine State”, www.kemlu.go.id, 29 Desember 2016

³⁰ “Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah”, Lembaga Penanggulangan Bencana, PP Muhammadiyah, 2005, hal 5

³¹ www.lazismu.org, “Latar Belakang”

Penyaluran dan pendayagunaan LAZISMU dan MDMC dalam program kemanusiaan didukung sumber daya dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan organisasi Otonom (Ortom). Berikut adalah aksesnya berkaitan dengan hasil Mukhtar ke-45 dengan rencana strategis:³²:

- Majelis Dikdasmen (pendidikan kesadaran bencana).
- MKKM (Tenaga Medis, Tenaga paramedis, Mahasiswa Bknakes, Jaringan Aumkes, Pekerja Sosial Kemanusiaan).
- TSPM (Pengamanan Aset-aset Muhammadiyah Pasca Bencana).
- Majelis Dikti (Keterlibatan PTM dalam Penanggulangan Bencana).
- MPM (Analisis sosial rawan bencana, Rekonstruksi dan rehabilitasi sosial, Resolusi konflik dan Rekonsiliasi, Pelatihan identifikasi posko bencana, Pengembangan komunitas lokal pasca bencana, memfasilitasi korban untuk pemenuhan hak dasar Advokasi, Advokasi regulasi tentang bencana).
- Pemuda Muhammadiyah dan IMM (Tim Relawan).
- Nasyyatul Aisyiyah (Pendampingan pemulihan trauma tenaga perempuan untuk tanggap darurat Pendampingan Ibu dan Anak).
- IPM/IRM (Pendampingan Pelajar pasca bencana, Membangun kesadaran kesiapsiagaan bencana bagi pelajar).
- Majelis Ekonomi (Pemulihan Ekonomi).
- MTDK (Bimbingan Keagamaan oleh Dai penyuluh).
- MPK (Tenaga Ahli Pelatihan).
- Majelis Wakaf dan Harta Benda (Tim sertifikasi Aset Muhammadiyah Pasca Bencana)
- Lembaga Pustaka dan Informasi (Pengelolaan web Suplay data dan informasi).
- LH dan HAM (Advokasi dan Hukum).
- Lembaga Lingkungan hidup (Pengetahuan dan mitigasi bencana ekologis).
- Hizbul Wathan (relawan HW untuk ditempatkan di daerah bencana).
- Aisyiyah/ MKLH (Pelayanan Kesehatan, Pemulihan lingkungan dan kesehatan, lingkungan Pendidikan kesadaran bencana).

Berkomunikasi dan bekerjasama dengan lembaga dalam maupun luar negeri diwujudkan antara lain:³³ dalam *Humanitarian Forum Indonesia*, Platform Nasional

³² “*Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*”, Risalah MDMC Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID, hal 16-17

³³ Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015, hal 11

Pengurangan Risiko Bencana, Konsorsium Pendidikan Bencana, Kluster Pendidikan dan Kluster Kesehatan.

KESIMPULAN

Keberadaan peran dakwah *Faith Based Organizations* (FBO) membutuhkan perspektif pergeseran dalam nilainya. Pergeseran ini sebagai dampak dari kasus-kasus kemanusiaan dan keterlibatan aktor non-negara. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan kemanusiaan yang dialami masyarakat.

Bantuan kemanusiaan menjadi alat komunikasi dan dakwah bagi Muhammadiyah dalam partisipasinya. Manusia dimanapun berada, menjadi ummat yang perlu mendapatkan layanan. Ajaran agama dari FBO merupakan awal dari nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, gerakan ini membantu para korban kemanusiaan mengkomunikasikan nilai-nilai dasar mereka dan tujuan dengan semua pihak. Secara transparan, aktifitas ini menjadi identitas Muhammadiyah sebagai advokat kemanusiaan untuk kebutuhan pengungsi Rohingya. Melengkapi fungsi negara yang tidak bisa menangani semua permasalahan.

REFERENSI:

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010 – 2015

Lembaga Penanggulangan Bencana, "*Pedoman Struktur, Organisasi dan Mekanisme Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah*", , PP Muhammadiyah, 2005

www.lazismu.org, "*Latar Belakang*"

Risalah MDMC, "*Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*", Cetakan I – 2009, Didukung oleh AusAID

www.kemlu.go.id

"*NGOs and Environmental Policies: Asia and Africa*", Edited by David Potter, Frank Cass London

Tarrow, Sidney, "*The New Transnational Activism*", www.cambridge.org, Cambridge University Press, 2005

Advisory Commission on Rakhine State, "*Towards A Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine*"

Advisory Commission on Rakhine State, "*Interim Report and Recommendations*", Maret 2017

Ba Tha, M. A. Tahir, "*History of Rohingyas and Kamans*"

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "*Fikih Kebencanaan*"

*Proceedings of the Workshop Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action
Faith-Based Organisations as Political, Humanitarian or Religious Actors,
Switzerland, The Graduate Institute of International Studies, Geneva May 18–
19 2005*

“Cerita Tentang Kiyai Haji Ahmad Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syoedja”

Baidhawy, Zakiyuddin, *“SATU ABAD MUHAMMADIYAH, Pergeseran Paradigma
Dakwah”*, e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id, 15 September 2016

Latief, Hilman, *“Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum
Modernis”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Fabiola, Riccardini, De Rosa Dalila, *“How the Nexus of Water/Food/Energy can be
seen with the Perspective of People Well being and the Italian BES
Framework”*, www.sciencedirect.com, 2016

